

## **EKSISTENSI DPR-RI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945**

**Oleh :**

**W.M. Herry Susilowati**

### **ABSTRACT**

*After the amendments of UUD 1945 in 1999, 2000, 2001 and 2002, it is likely that Indonesia Parliament (DPR-RI) has gives bord. It's existence as an institution that has legislative, budget and control functions as well as interpellation, inquiry and expressing the oponions rights. Therefore, it is strongly expexted to be able to act as national institution that accomodates the people's aspiration.*

*Key word : Amendments UUD 1945, Budget and Control Function, National Institution.*

### **PENDAHULUAN**

Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah.

Pada masa awal reformasi ada semacam consensus untuk memperbaharui UUD 1945. Pembaharuan UUD 1945 dipandang sebagai suatu kemestian. Pandangan ini bukan saja karena dinamika social, politik, dan ekonomi yang menuntut penyesuaian aturan dasar sebagai landasan yang lebih kuat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Dalam perkembangan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 telah memberikan perubahan yang besar pada peran lembaga-lembaga Negara khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat DPR) untuk melakukan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sangat diharapkan DPR dapat berperan sebagai pengawal